

PM Inggris Boris Johnson Akui Telah Punya Enam Anak

LONDON(IM) - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akhirnya mengakui telah memiliki enam anak. Sebelumnya dia selalu berusaha menghindari seputar konfirmasi jumlah anaknya.

Johnson berbicara kepada acara NBC's Today di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam program itu, dia ditanya oleh seorang pewawancara apakah memiliki enam anak dan dia menjawab "ya".

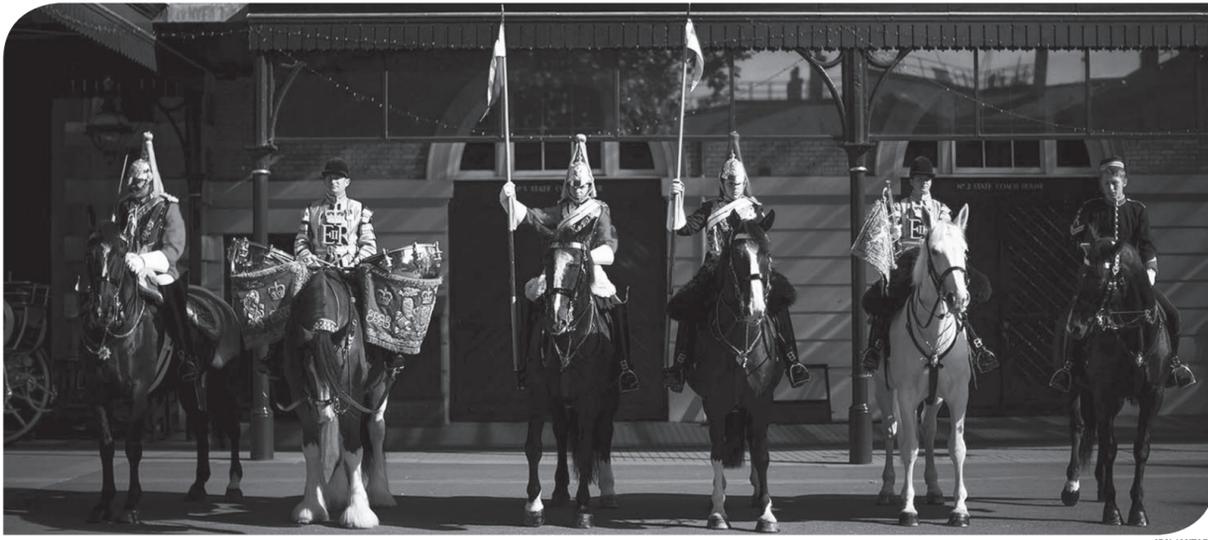
Jumlah anak Johnson telah menjadi bahan pembicaraan dalam politik Inggris selama bertahun-tahun. Obrolan publik ini muncul usai pengadilan Inggris mengeluarkan perintah yang melarang organisasi berita melaporkan keberadaan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perselingkuhan di luar nikah.

Dikutip dari CNN, Johnson memiliki empat anak dengan mantan istrinya Marina Wheeler, satu putri dari perselingkuhan, dan seorang putra dengan istri yang dinikahinya.

Johnson pun mengatakan kepada NBC bahwa luar biasa memiliki bayi di 10 Downing Street, tetapi itu juga memberikan banyak pekerjaan. "Tapi aku benar-benar menyukainya. Aku mengganti banyak popok," ujarnya.

Pada Agustus, Carrie Johnson mengumumkan di Instagram bahwa pasangan itu mengharapkan anak kedua dan mengungkapkan bahwa dia telah mengalami keguguran di awal tahun. Putra pasangan itu, Wilfred, lahir pada April 2020, tak lama setelah Johnson dirawat di rumah sakit dengan gejala Covid-19 yang begitu parah sehingga dirawat di unit perawatan intensif.

Menurut keterangan pasangan tersebut, Wilfred diberi nama tengah Nicholas sebagai penghormatan kepada para dokter yang menyelamatkan hidup Johnson setelah penyakit Covid-19 yang dideritanya. ● gul



PERINGATAN PLATINUM JUBILEE DI LONDON - INGGRI

Anggota Household Cavalry berada diatas kuda di halaman Royal Mews pada peluncuran media 'Peringatan Platinum Jubilee: Berpacu Melalui Sejarah' di Istana Buckingham, London, Inggris, Selasa (21/9).

Tolak Perang, Presiden AS Berjanji Akan Memulai Diplomasi

Istilah perang abadi pun akan diganti dengan diplomasi abadi. Demikian komitmen Biden.

NEW YORK(IM) -Presiden Amerika, Joe Biden, menjanjikan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Afganistan.

Istilah perang abadi pun akan diganti dengan diplomasi abadi. Demikian komitmen Biden.

Ini adalah satu titik balik bersejarah dalam kepemimpinan Amerika Serikat selama bertahun-tahun.

"Saat saya berdiri di sini hari ini, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun Amerika Serikat tidak berperang. Kami telah membalik halaman," kata Biden dalam pidato pertamanya di Majelis Umum PBB sebagai presiden.

"Semua kekuatan, energi, komitmen, kemauan, dan sumber daya yang tak tertandingi dari bangsa kami sekarang sepenuhnya dan sepenuhnya terfokus pada apa yang ada di depan kita, bukan apa yang ada di belakang," imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (22/9).

Untuk mendukung pidatonya, Biden berjanji akan memberikan USD11 miliar setahun kepada negara-negara berkembang guna mendukung respons mereka terhadap darurat iklim global.

Biden melakukan debut kepresidenannya hanya beberapa minggu setelah penarikan yang kacau dari Afghanistan, yang secara luas dipandang di antara negara-negara anggota PBB terburu-buru karena alasan politik domestik, dengan sedikit perhatian terhadap warga PBB terburu-buru yang tertinggal untuk menghadapi Taliban.

Dalam pidatonya, Biden berusaha menempatkan penarikan pasukan itu dalam perspektif sejarah yang lebih luas dan lebih positif.

"Kami telah mengakhiri

20 tahun konflik di Afghanistan, dan saat kami menutup periode perang tanpa henti ini, kami membuka era baru diplomasi tanpa henti, menggunakan kekuatan bantuan pembangunan kami untuk berinvestasi dalam cara-cara baru mengangkat orang di seluruh dunia, memperbaiki dan membela demokrasi," katanya.

Biden bersikeras bahwa AS akan terus membela diri dan sekutunya, termasuk meningkatkan operasi kontra-terorisme, tetapi akan jauh lebih konservatif dalam menggunakan kekuatan, untuk menghindari jatuh kembali ke dalam perang yang berlarut-larut seperti di Afghanistan dan Irak, yang kemudian dikenal dalam bahasa politik AS sebagai "perang selamanya".

"Misi harus jelas, dan dapat dicapai, dilakukan dengan persetujuan rakyat Amerika dan, bila memungkinkan, dalam kemitraan dengan sekutu kami," kata Biden, menggemakan pidatonya setelah penarikan dari Afghanistan, di yang disebutnya mengakhiri era operasi militer besar untuk membuat kembali negara lain.

Tetapi Biden menjelaskan bahwa penarikan dari Afghanistan juga merupakan masalah mengalihkan perhatian dan sumber daya ke timur jauh. "Poros ke Asia" yang telah lama digembar-gemborkan dalam kebijakan luar negeri AS ini telah dipercepat di bawah kepresidenan Biden. Hal ini terlihat di Gedung Putih sebagai keharusan untuk menahan dan bersaing dengan China, persaingan yang hanya ditangani oleh Biden secara tidak langsung.

"Amerika Serikat akan bersaing dan akan bersaing dengan penuh semangat dan memimpin dengan nilai-nilai dan kekuatan kami," ujarnya.

"Kami akan membela sekutu dan teman-teman kami, dan menentang upaya negara-negara yang lebih kuat untuk mendominasi negara-negara yang lebih lemah melalui perubahan wilayah dengan kekerasan, pemaksaan ekonomi eksploitasi atau disinformasi. Tapi kami tidak mencari - saya akan mengatakannya lagi - kami tidak mencari perang dingin baru atau dunia yang terbagi menjadi blok-blok

kaku," tegasnya. "Kekuatan militer AS harus menjadi alat pilihan terakhir kami, bukan yang pertama kami," tambah presiden.

"Itu (militer) tidak boleh digunakan sebagai jawaban untuk setiap masalah yang kita lihat di seluruh dunia. Memang, hari ini banyak dari keprihatinan terbesar kita tidak dapat diselesaikan atau bahkan diatasi melalui kekuatan senjata," ucapnya.

Sebagai contoh, Biden mencontohkan: "Bom dan peluru tidak dapat bertahan melawan Covid-19."

Ketika dunia berduka atas 4,5 juta orang yang tewas sejauh ini dalam pandemi, Biden menyerukan tindakan kolektif ilmu pengetahuan dan kemauan politik.

"Kita perlu bertindak sekarang untuk mendapatkan vaksin secepat mungkin," seru Biden.

Dia mengatakan AS telah mengirimkan lebih dari 160 juta dosis vaksin Covid-19 ke luar negeri, dan menginvestasikan USD15 miliar dalam mekanisme respons pandemi global. ● tom

Taliban Minta Perwakilan di PBB, Picu Perdebatan

NEWYORK(IM) - Taliban memicu perdebatan di Majelis Umum PBB setelah meminta perwakilan di badan internasional itu. Langkah ini diyakini akan memicu pertemuan diplomatik dengan utusan Afghanistan yang sudah ada sebelumnya. Afghanistan saat ini di PBB diwakili oleh Ghulam Isaccai, orang yang ditunjuk dari pemerintahan sebelumnya yang runtuh di bawah serangan cepat Taliban bulan lalu. Permintaan oleh Taliban dan Isaccai sekarang sedang dipertimbangkan oleh komite kredensial PBB.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengungkapkan bahwa Taliban, yang sekarang memerintah Afghanistan, pada awal pekan ini telah menginstruksikan PBB untuk menggantikan Isaccai dengan perwakilan mereka sendiri. "Sekretaris Jenderal menerima komunikasi dengan kop surat Kementerian Luar Negeri Imarah Islam Afghanistan, tertanggal 20 September 2021, ditandatangani oleh Ameer Khan Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri, meminta untuk berpartisipasi dalam sesi ke-76 Majelis Umum PBB pada 21-27 September 2021," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Rabu (22/9).

Menurut surat itu, Isaccai tidak lagi mewakili Afghanistan. Sebaliknya, mereka menyebut Mohammad Suhail Shaheen sebagai calon wakil tetap kelompok militan Islam itu di New York. Pengamat PBB telah mengantisipasi potensi konflik tahun ini atas setidaknya dua kursi di Aula Majelis Umum, kursi Myanmar dan Afghanistan, di mana rezim baru baru-baru ini naik ke tampuk kekuasaan tetapi diplomat yang mewakili pemerintah sebelumnya masih memegang akreditasi PBB.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan, Isaccai terus mengadvokasi negaranya, bertemu dengan utusan asing dan bahkan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menekan Taliban agar membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. "Kedua surat itu sekarang telah dikirim ke Komite Kredensial PBB," kata Dujarric.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan AS jelas

akan mengikuti masalah ini dengan cermat dan mempertimbangkan bersama dengan anggota Komite Kredensial lainnya dan mencatat bahwa mereka tidak mengharapkan keputusan dibuat sebelum pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB akhir pekan ini.

"Komite Kredensial umumnya membutuhkan waktu. Saya tidak akan memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan saat ini," kata pejabat itu kepada wartawan melalui telepon.

Masa depan demokrasi di bawah Taliban - dan khususnya hak-hak perempuan dan anak perempuan - adalah topik hangat selama pertemuan tingkat tinggi di PBB ini, yang telah menyaksikan lebih dari seratus pemimpin nasional berkumpul di New York. Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat memberikan suara bulat untuk memperpanjang Misi Bantuan PBB di negara itu selama enam bulan.

Penerimaan PBB atas data besar Taliban akan menjadi langkah penting dalam upaya kelompok Islam garis keras itu untuk mendapatkan pengakuan internasional, yang dapat membantu membuka dana yang sangat dibutuhkan untuk ekonomi Afghanistan yang kekurangan uang. Guterres mengatakan bahwa keinginan Taliban untuk pengakuan internasional adalah satu-satunya pengaruh yang dimiliki negara-negara lain untuk menekan pemerintah yang inklusif dan menghormati hak-hak, terutama bagi perempuan, di Afghanistan.

Menurut aturan Majelis Umum PBB, sampai keputusan dibuat oleh komite kredensial Isaccai akan tetap menjabat sebagai utusan Afghanistan. Dia saat ini dijadwalkan untuk berpidato di hari terakhir pertemuan pada 27 September, tetapi tidak segera jelas apakah ada negara yang keberatan setelah surat Taliban. Komite biasanya bertemu pada bulan Oktober atau November untuk menilai kredensial semua anggota PBB sebelum menyerahkan laporan untuk persetujuan Majelis Umum sebelum akhir tahun. Komite dan Majelis Umum biasanya beroperasi dengan konsensus tentang kredensial, kata para diplomat. ● gul

Sejak Taliban Berkuasa, Tukang Pangkas Rambut di Afghanistan Menderita

KABUL(IM) - Quiff, mohawk, dan crew cut adalah gaya rambut yang biasa digunakan Nader Shah untuk ditata oleh pria muda yang sadar akan citra di kota terbesar ketiga di Afghanistan, Herat.

Tetapi sejak Taliban berkuasa pada pertengahan Agustus, warga Afghanistan memiliki sedikit yang untuk dicadangkan dan takut dihukum karena memotong rambut pendek atau modis.

"Sebelumnya, orang-orang datang dan meminta gaya rambut yang berbeda, tapi sekarang tidak seperti itu lagi," kata Shah (24) di toko pangkas rambutnya, dengan cermin menuti setiap dinding. "Sekarang mereka patah hati," imbuhnya seperti dikutip dari France24, Rabu (22/9).

Selama masa kekuasaan pertama Taliban dari tahun 1996 hingga 2001, kelompok garis keras ini melarang gaya rambut flamboyan dan memaksa pria menumbuhkan janggut.

Setelah mereka digulingkan, bercukur bersih sering dianggap sebagai tanda modernitas, termasuk di kota barat Herat yang relatif kosmopolitan. "Sekarang orang datang ke sini dan mereka hanya meminta potongan sederhana," ungkap Shah.

"Mereka juga tidak mencukur janggut mereka, jadi itu

masalah sekarang," sambungnya. Tukang pangkas rambut itu, yang telah berkecimpung dalam bisnis selama 15 tahun setelah memulai sebagai magang muda, mengatakan penurunan telah menyebabkan pendapatan hariannya anjlok dari USD15 atau sekitar Rp213 ribu menjadi antara Rp71 ribu hingga Rp99 ribu.

Di tempat lain, Mohammad Yousefi (32) mengatakan bahwa dia harus menurunkan harga secara dramatis. Jika sebelumnya pangkas rambut dikenakan tarif Rp85 ribu, kini hanya Rp14 ribu. Itu dilakukan untuk menjaga tokonya tetap berjalan. "Karena situasi Taliban, pelanggan memiliki pendapatan lebih sedikit dan mereka membayar kami lebih sedikit," ucapnya.

Yousefi mengatakan bahwa setelah kelompok Islam garis keras menguasai negara itu, warga Afghanistan secara tiba-tiba ingin membuat diri mereka terlihat seperti Taliban.

"Ini tidak seperti Taliban yang modis, tetapi orang-orang tidak mencukur janggut mereka karena Taliban akan berhenti dan bertanya kepada mereka tentang hal itu," ungkapnya.

"Mereka mengatakan itu tidak dalam hukum syariah, dan laki-laki harus memiliki janggut dan rambut panjang," terangnya.

Di toko pangkas rambut Ali Reza (36), lampu sorot merah muda menyinari pelanggan dan rak-rak dipenuhi kaleng semprotan rambut, gel, mousse, cologne, dan masker wajah.

Tukang pangkas dengan cekatan memotong guntingnya di atas janggut pelanggan saat klien yang tengah menunggu mendiskusikan politik Afghanistan.

Dua muridnya - keponakan Reza yang berusia 11 tahun, Sobhan dan Mohsan, 14 tahun - mengawasi setiap gerakannya, merapikan sikat, sisir dan gunting listrik, serta membantu membuka pisau silet.

Reza menyelesaikan keahliannya dengan penuh gaya, mengetik-ngetikkan jarinya di atas kepala pelanggan, memijat pelipis dan alisnya, sebelum mengernyitkan telinga klien yang tidak curiga selama beberapa detik.

"Dulu, anak-anak muda datang setiap satu atau dua minggu untuk memotong rambut atau janggut mereka, dan mereka senang," ungkap Reza kepada AFP, seraya menambahkan banyak kliennya kini telah melarikan diri.

Sejak pengambilalihan Taliban, warga Afghanistan mengatakan kesempatan kerja telah mengering. "Dulu penghasilan saya luar biasa, dan sekarang tidak," katanya. ● ans



UNJUK RASA PETANI INDIA

Sejumlah petani berbaring di kuburan yang mereka gali sebagai bentuk protes menentang uu pertanian, di desa Mandola, Ghaziaba, India, Selasa (21/9).

Pengadilan Eropa Sebut Rusia di Balik Pembunuhan Eks Agen KGB

LONDON(IM)-Pengadilan HAM Eropa pada Selasa mengeluarkan putusan bahwa Rusia bertanggung jawab atas pembunuhan bekas agen badan intelijen Uni Soviet KGB, Alexander Litvinenko, yang diracun dengan Polonium-210. Litvinenko yang kerap mengkritik pemerintah Rusia, tewas pada 2006 di London setelah dibunuh dengan menggunakan zat isotop radioaktif tersebut.

Litvinenko (43 tahun), meninggal beberapa pekan setelah ia minum teh hijau yang dicampuri Polonium-210 di hotel Millennium di London. Dalam putusannya, Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) menyatakan bahwa Rusia bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

"Pembunuhan Litvinenko ini berkaitan dengan Rusia," kata ECHR melalui pernyataannya.

Menurut hasil penyelidikan panjang yang dilakukan Inggris dan selesai pada 2016, Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan menyetujui

operasi intelijen untuk membunuh Litvinenko. Penyelidikan itu juga menyimpulkan bahwa mantan pengawal asal KGB, Andrei Lugovoy, serta satu warga Rusia lainnya bernama Dmitry Kovtun adalah orang-orang yang melaksanakan pembunuhan itu.

Kedua warga Rusia itu disebutkan kemungkinan menjalankan operasi tersebut atas arahan dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), yang merupakan badan keamanan utama penerus KGB.

ECHR setuju dengan kesimpulan tersebut. "Pembunuhan dilakukan oleh Pak Lugovoy dan Pak Kovtun," demikian bunyi putusan ECHR.

Lugovoy dan Kovtun membantah tuduhan itu. Inggris telah sekian lama menuding Rusia sebagai pihak di balik serangan dengan isotop radioaktif itu. Rusia selama ini membantah terlibat dalam kematian Litvinenko. Kasus pembunuhan itu telah merusak hubungan Inggris-Rusia pasca-Perang Dingin. ● ans



TARIAN BALET "SOUL CHAIN"

Penari menampilkan tarian balet "Soul Chain" oleh Staatstheater Mainz pada Festival Tari Kontemporer Internasional "DanceInversion" di Helikon-Opera, Moskow, Rusia, Selasa (21/9).

Sudan Tangkap Dalang Upaya Kudeta

KHARTOUM(IM)-Dewan Pertahanan dan Keamanan Sudan pada Selasa (21/9) mengumumkan penangkapan Mayjen Abdul-Baqi Hassan Osman, dalang di balik upaya kudeta yang gagal.

Dewan menambahkan bahwa 22 pejabat militer lainnya dari tingkatan berbeda dan sejumlah bintang serta tentara juga diamankan. Dewan menggelar rapat darurat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kedaulatan Sudan Abdel Fattah Al-Burhan untuk membahas situasi keamanan di Sudan usai terjadinya percobaan kudeta.

"Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa upaya kudeta bertujuan untuk merebut kekuasaan dan mengacaukan masa transisi saat ini," ungkap Menteri Pertahanan Sudan Yassin Ibrahim Yassin lewat pernyataannya.

Pada Selasa pagi, otoritas Sudan mengumumkan ada upaya kudeta gagal yang dilancarkan oleh sekelompok pejabat militer dari sisa-sisa

rezim terdahulu. Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan upaya kudeta itu dirancang oleh orang-orang dari dalam dan dari luar militer.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengancam keras upaya kudeta di Sudan, dan bersumpah untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional.

Guterres memperingatkan "setiap upaya untuk melemahkan transisi politik Sudan akan membahayakan kemajuan yang diperoleh dengan susah payah di bidang politik dan ekonomi," kata juru bicaranya, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

"Sekretaris Jenderal menyerukan semua pihak untuk tetap berkomitmen pada transisi dan realisasi aspirasi rakyat Sudan untuk masa depan yang inklusif, damai, stabil, dan demokratis," kata Dujarric.

"PBB mendukung Pemerintah dan rakyat Sudan dalam masalah ini," tutur dia. ● gul